

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP *VALUE FOR MONEY*
(Studi Kasus Pada Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : Ade Khairunnisa
NPM : 1705170304
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : ADE KHAIRUNNISA
NPM : 1705170304
Program Studi : AKUNTANSI
Konseentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP VALUE FOR MONEY (STUDI KASUS PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA UTARA)

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II


(Dr. ZULIA HANUM, SE, M.Si)


(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak)

Pembimbing


(LUFRIANSYAH, SE, M.Ak)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)


(Assoc. Prof. DR. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ADE KHAIRUNNISA
N.P.M : 17051701304
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP VALUE FOR MONEY (STUDI KASUS PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA UTARA)

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2021

Pembimbing Skripsi

(LUFRIANSYAH, SE, M.Ak)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(NURI, SE, MM, M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ade Khairunnisa
NPM : 1705170304
Dosen Pembimbing : Lufriansyah, S.E., M.Ak
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* (Studi Kasus pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Memperjelas latar belakang - Menambahkan identifikasi masalah - Menghilangkan batasan masalah	5/7-21	
Bab 2	Menambahkan label penelitian terdahulu	5/7-21	
Bab 3	Perbaiki sesuai pedoman	5/7-21	
Bab 4	Menambah pembahasan	5/7-21	
Bab 5	-	5/7-21	
Daftar Pustaka	Perbaiki daftar pustaka sesuai mendeley	5/7-21	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC sidang meja hijau	5/7-21	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Juli 2021
Dosen Pembimbing

(Lufriansyah, S.E., M.Ak)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Ade Khairunnisa
NPM : 1705170304
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi
Perencanaan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Mercayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan.....20.

Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

Ade Khairunnisa, NPM. 1705170304. Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value for Money (Studi Kasus pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara). Skripsi. 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2020 dengan menggunakan prinsip value for money yang meliputi rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan data kuantitatif yang berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara ditinjau dari rasio ekonomis sudah ekonomis karena realisasi belanja masih dibawah anggaran belanja, namun terjadi penurunan atas kinerjanya. Ditinjau dari rasio efisiensi terus mengalami penurunan karena setiap tahunnya mengalami defisit. Dan ditinjau dari rasio efektivitas tergolong efektif karena mampu mencapai bahkan melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Pengukuran Kinerja, Value for Money, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'amin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat beriringkan salam kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia.

Skripsi dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip *Value for Money* (Studi Kasus Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara)” ini sengaja dibuat sabagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat selama proses pembuatan skripsi ini, yang selalu memberikan arahan, bantuan, dan dukungan penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Terkhusus kepada orang-orang yang sangat spesial, kedua orang tua tersayang Bapak Rusli dan Ibu Sulastri yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh baik moril maupun materiil. Dan juga kepada kakak tersayang Rizki Khairani yang selalu mendengar dan memberi dukungan. Begitu juga Muhammad Dimas Rafli dan Rizka Khairiah yang selalu menghibur penulis di setiap keadaan. Penulis tidak akan bisa sampai sejauh ini tanpa dukungan mereka.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga telah banyak mendapat arahan dan dukungan dari berbagai pihak yang tidak terhitung banyaknya. Maka pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Dr. Ade Gunawan , S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Lufriansyah, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis.
8. Seluruh dosen dan pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh staff dan pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.

10. Kepada Ramadayanti Saragih, Nurhalimah, dan Rifa Mutia Nasution yang selalu mendukung, menghibur, dan membantu penulis dari awal perkuliahan sampai akhir.

11. Kepada Salsabila Alqhirasya Lokollo dan Dewi Savira sebagai teman sejak sekolah yang selalu mendukung saya walaupun jarang bertemu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Skripsi ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, namun penulis sadar masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Medan, Juni 2021

Hormat saya

Ade Khairunnisa

1705170304

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Uraian Teori.....	8
2.1.1 Akuntansi Sektor Publik.....	8
2.1.2 Value for Money.....	11
2.1.3 Penganggaran Sektor Publik.....	18
2.1.4 Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	26
2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
2.3 Kerangka Berpikir.....	33
BAB III. METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	35
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40

3.6 Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV. PEMBAHASAN.....	42
4.1 Deskripsi Data.....	42
4.2 Analisis Data	46
4.3 Pembahasan.....	51
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020.....	4
Tabel 2.1	Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan.....`	15
Tabel 2.2	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan.....	17
Tabel 2.3	Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.....	18
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1	Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan.....	33
Tabel 3.2	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan.....	34
Tabel 3.3	Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.....	35
Tabel 3.4	Waktu Penelitian.....	36
Tabel 4.1	Rasio Ekonomis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara	43
Tabel 4.2	Rasio Efisiensi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.....	46
Tabel 4.3	Rasio Efektivitas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Berpikir.....	31
----------	------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik di Indonesia telah berkembang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Hak otonomi daerah memberikan kebebasan setiap organisasi sektor publik di masing-masing daerah untuk mengolah dan meningkatkan kinerjanya, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerahnya. Namun pada kenyataannya, organisasi sektor publik sering menjadi tempat inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang sering merugi. Keberhasilan otonomi daerah tidak luput dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Kinerja merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap organisasi, baik organisasi bisnis maupun publik. Setiap individu atau organisasi mempunyai kriteria dalam mengukur kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat berupa tujuan-tujuan atau target-target yang ingin dicapai. Untuk menilai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan targetnya maka diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja harus berdasarkan karakteristik operasional organisasi untuk mendefinisikan indikator dan pengukuran yang digunakan.

Dalam organisasi sektor publik, kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji. Sejak diterapkannya anggaran berbasis kinerja setiap organisasi sektor publik terutama pemerintahan dituntut agar mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah yang baik. Setiap organisasi sektor publik yang ada di pemerintah pusat maupun daerah, diharapkan dapat mengurangi tindakan penyelewengan dan hal-hal seperti pemborosan, kebocoran dana, dan mendeteksi program-program yang kurang layak untuk memenuhi tuntutan atas meningkatnya akuntabilitas publik yang terus meningkat kepada organisasi publik. Pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan menjunjung tinggi keinginan masyarakat agar tercipta *Good Governance*.

Pengukuran kinerja dalam instansi pemerintah merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk evaluasi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolak ukur yang telah dibuat terhadap instansi pemerintah. Ukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan anggaran berbasis kinerja dapat dilakukan dengan konsep *value for money*, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2013). Adapun tujuan yang diinginkan masyarakat dalam tiga elemen tersebut, yaitu ekonomis berarti hemat dan cermat dalam pengadaan

dan alokasi sumber daya, efisiensi berarti dapat meminimalkan penggunaan sumber daya dengan hasil yang maksimal, dan efektivitas berarti berhasil mencapai target dan tujuannya.

Penerapan konsep *value for money* penting bagi pemerintah sebagai pelayanan masyarakat (Mardiasmo, 2013). Hal ini dikarenakan implementasi konsep tersebut akan memberikan manfaat untuk menilai efektivitas pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, alokasi belanja yang berorientasi atas kepentingan publik, dan meningkatkan *public cost awareness* sebagai dasar pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu instansi pemerintah. Laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan (Sihombing, 2008). Jika dibandingkan dengan laporan neraca, laporan realisasi anggaran menduduki sebagai prioritas yang lebih penting. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (DISPORA PROVSU) merupakan salah satu instansi pemerintah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. DISPORA PROVSU mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah atau kewenangan Provinsi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, layanan kepemudaan sarana dan prasarana olahraga serta tugas pembantuan.

Tabel 1.1

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018-2020
(dalam Rupiah)**

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2018	1.075.000.000	1.225.557.250	113.338.446.413	104.716.485.881
2019	1.260.000.000	1.647.605.250	149.929.817.472	127.393.224.181
2020	793.800.000	382.160.250	308.182.643.183	275.832.628.993

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa kinerja DISPORA PROVSU pada tahun 2018 dan 2019 mampu melampaui anggaran pendapatan yang ditetapkan. Namun pada tahun 2020 tidak mampu mengumpulkan pendapatan sesuai anggaran, hal ini dikarenakan adanya dampak dari Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan sumber pendapatan DISPORA PROVSU berkurang. Sedangkan dilihat dari aspek belanja DISPORA PROVSU tahun 2018 sampai dengan 2020 mampu melakukan kegiatan belanja tanpa melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan DISPORA PROVSU sudah ekonomi dan efektif, akan tetapi belum efisien dalam pengelolaan keuangannya.

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan value for money dilakukan oleh (Ardila, 2015) dan (Khairunnisa, 2018). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kinerja organisasi sektor publik belum sepenuhnya mengaplikasikan prinsip *value for money* yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dengan semikian penelitian serupa perlu dilakukan. Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengukuran Kinerja**

Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip *Value for Money* (Studi Kasus Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan pada tahun 2020.
2. Anggaran belanja yang telah ditetapkan selalu terdapat sisa anggaran.
3. Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya mengaplikasikan *value for money*.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2020 dengan metode *value for money* ditinjau dari rasio ekonomis?
- b. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2020 dengan metode *value for money* ditinjau dari rasio efisiensi?
- c. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2020 dengan metode *value for money* ditinjau dari rasio efektivitas?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur dan mengetahui kinerja keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2020 dengan metode *value for money* yang ditinjau dari rasio ekonomis.
- b. Untuk mengukur dan mengetahui kinerja keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2020 dengan metode *value for money* yang ditinjau dari rasio efisiensi.
- c. Untuk mengukur dan mengetahui kinerja keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2020 dengan metode *value for money* yang ditinjau dari rasio efektivitas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada cabang ilmu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

- 1) Sebagai masukan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kinerja keuangannya.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai konsep *value for money*.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

a. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Indra, 2016), akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Dengan adanya tuntutan dari masyarakat kepada seluruh lembaga publik untuk mengelola kebutuhan publik secara transparan dan bertanggungjawab. Maka akuntansi sektor publik digunakan sebagai sistem akuntansi yang digunakan lembaga-lembaga publik untuk menjadi salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik.

Pada umumnya organisasi sektor publik sering diartikan sebagai organisasi yang bertujuan untuk kepentingan publik. Atas dasar bertujuan untuk kepentingan publik maka organisasi sektor publik biasanya tidak berfokus pada laba atau keuntungan sebagai tujuan akhirnya. Akan tetapi organisasi sektor publik memiliki fokus untuk kesejahteraan masyarakat. Namun suatu organisasi tetap menjalankan proses manajemen seperti kegiatan perencanaan, pengendalian biaya, dan kegiatan serta evaluasi.

Organisasi sektor publik biasanya merujuk pada organisasi pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. Organisasi sektor publik berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, dimana pemerintah diberi kekuasaan oleh masyarakat untuk mengatur dan menjamin pemenuhan segala kebutuhan barang dan jasa publik berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, menurut (Mardiasmo, 2013) organisasi pemerintah merupakan organisasi yang memiliki ruang lingkup yang paling luas diantara organisasi publik lainnya, seperti perguruan tinggi, rumah sakit, organisasi publik, organisasi massa, dan lain sebagainya.

Organisasi sektor publik memiliki tujuan, karakteristik, struktur dan proses, serta lingkungan operasional yang berbeda dengan sektor privat atau sektor swasta. Walaupun sebenarnya ada beberapa tugas dan fungsi organisasi sektor publik yang dapat dilakukan oleh organisasi sektor swasta dalam hal pelayanan publik seperti layanan transportasi, komunikasi, pendidikan, dan sebagainya. Namun, pada bidang tertentu peranan organisasi sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta seperti fungsi perizinan dan birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, terdapat beberapa perbedaan dalam akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta.

b. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik sangat berhubungan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Wilayah sektor publik memiliki wilayah yang lebih luas dan lebih kompleks jika dibandingkan dengan sektor swasta. Jika dilihat dari kelembagaan wilayah publik

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu organisasi nonlaba pemerintah dan organisasi nonlaba non pemerintah.

Organisasi nonlaba pemerintahan adalah badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah), sedangkan organisasi nonlaba nonpemerintah meliputi organisasi sukarelawan, rumah sakit, sekolah tinggi, dan universitas, serta organisasi lainnya seperti yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, organisasi politik, dan lain sebagainya. Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah sektor publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda.

c. Sifat dan Karakteristik Sektor Publik

Akuntansi sektor publik diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, yang harus memiliki manfaat bagi publik. Dalam beberapa hal akuntansi sektor publik yang berbeda dengan sektor swasta/komersial, disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Sifat dan karakteristik organisasi sektor publik terutama tujuan, sifat dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi nonlaba atau tidak mencari keuntungan. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraannya. Pemberi dana tidak berkehendak untuk meminta pengembalian, bunga, ataupun memiliki organisasi.

d. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (Glynn, 2013) menyatakan bahwa tujuan organisasi sektor publik adalah untuk:

- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

2.1.2 Value for Money

a. Pengertian Value for Money

Value for money adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya ditinjau dari aspek keuangan saja, tetapi juga dapat ditinjau dari non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik (Ardila, 2015).

Value for money merupakan suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program yang mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Melalui konsep *value for money* memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran dana yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat.

Organisasi sektor publik sering dinilai sebagai tempat inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang sering merugi. Sehingga muncul tuntutan baru agar organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan metode *value for money*, selain penilaian kinerja yang bersifat finansial terdapat juga penilaian kinerja yang bersifat non finansial, yaitu penilaian pada kualitas pelayanan dengan memperhatikan kualitas yang konsisten seperti memenuhi ekspektasi pelanggan sasaran.

Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis agar fungsi perencanaan dan pengawasan berjalan dengan baik. *Value for money* menuntut organisasi sektor publik agar bisa memenuhi prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas secara bersama-sama.

b. Manfaat *Value for Money*

Value for money bermanfaat dalam pengukuran kinerja keuangan organisasi sektor publik karena sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai dasar pelaksanaan akuntabilitas publik. Selain itu, *value for money* dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai dengan target sehingga terciptanya kualitas pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektif.

Manfaat penerapan *value for money* bagi sektor publik dan masyarakat adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2013):

- a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- c. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
- d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
- e. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

c. Indikator *Value for Money*

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2013). Adapun tiga elemen utama dalam *value for money*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ekonomis, yaitu perolehan sumber daya dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan antara sumber daya dengan biaya sumber daya yang dinyatakan dalam satuan moneter. Hal ini berhubungan dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir penggunaan sumber daya yaitu dengan menghindari pengeluaran yang tidak efektif dan boros.
- 2) Efisiensi, yaitu pencapaian hasil yang maksimal dengan sumber daya tertentu atau penggunaan sumber daya terendah untuk mencapai hasil tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan antara hasil atau sumber

daya yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

- 3) Efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana. Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil dengan dampak.

Tuntutan masyarakat dalam *value for money* adalah ekonomis (hemat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya), efisiensi (meminimalkan penggunaan sumber daya dan memaksimalkan hasil), serta efektivitas (berhasil mencapai tujuan dan sasaran). Indikator *value for money* dibagi menjadi dua, yaitu (Mardiasmo, 2013):

- 1) Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi)

Ekonomis artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik. Dan efisiensi artinya hasil tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya.

- 2) Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Efektivitas artinya kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

d. Pengukuran *Value for Money*

- 1) Rasio Ekonomis

Ekonomis adalah perolehan sumber daya tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis merupakan perbandingan antara sumber daya dengan biaya sumber daya yang dinyatakan dalam satuan moneter. Hal ini berhubungan dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat

meminimalisir penggunaan sumber daya yaitu dengan menghindari pengeluaran yang tidak efektif dan boros.

Rasio ini hanya mempertimbangkan sumber daya yang dipergunakan saja. Ekonomis merupakan ukuran yang relatif. Suatu kegiatan dapat dikatakan ekonomis jika dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan biaya yang tidak diperlukan. Jika terjadi peningkatan biaya maka seharusnya ada peningkatan manfaat yang lebih besar pula. Pengukuran dengan rasio ekonomis membutuhkan data-data berupa anggaran belanja dan realisasi belanja. Adapun rumus rasio ekonomis adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Ekonomis berkaitan dengan pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Pengukuran ekonomi melalui rasi antara masukan aktual dengan yang direncanakan (Ulum, 2012). Kinerja pemerintah daerah dikatakan sangat ekonomis jika rasionya diatas 100%. Hal ini dapat juga dilihat dengan jumlah realisasi atas penerimaan lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan. Adapun kriteria ekonomis dalam penilaian kinerja keuangan yaitu:

Tabel 2.1. Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90% - 100%	Ekonomis
80% - 90%	Cukup Ekonomis
60% - 80%	Kurang Ekonomis
Kurang Dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber : (Cipta, 2014)

2) Rasio Efisiensi

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara sesuatu yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien jika suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya.

Dalam pengukuran kinerja dengan metode *value for money*, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Efisiensi alokasi. Hal ini berhubungan dengan kemampuan untuk mempergunakan sumber daya pada tingkat kapasitas optimal.
- b) Efisiensi teknis atau manajerial. Hal ini berhubungan dengan kemampuan untuk mempergunakan sumber daya pada tingkat hasil tertentu.

Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga elemen *value for money*. Karena apabila dibandingkan dengan ekonomis dan efektivitas, efisiensi merupakan salah satu indikator *value for money* yang dapat diukur dengan rasio antara hasil dengan sumber daya. Adapun rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja}{Realisasi\ Pendapatan} \times 100\%$$

Semakin kecil rasio efisiensi artinya kinerja organisasi tersebut semakin baik. Berikut ini kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang Dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : (Cipta, 2014)

3) Rasio Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara hasil dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidak suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Dalam efektivitas hal terpenting yang harus diketahui yaitu efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rumus rasio efektivitas yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Suatu organisasi sektor publik dikatakan sangat efektif dalam menjalankan tugasnya apabila rasio yang dicapai diatas seratus persen.

Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja organisasi tersebut. Adapun kriteria efektivitas kinerja keuangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Rasio Efektivitas	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang Dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : (Cipta, 2014)

2.1.3 Penganggaran Sektor Publik

a. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan hasil kerja (*output*) terutama berupa taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan masa mendatang. Karena anggaran merupakan hasil kerja (*output*), maka anggaran dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis. Sedangkan proses dan metode untuk mempersiapkan suatu anggaran disebut penganggaran. Penganggaran adalah proses kegiatan yang menghasilkan penganggaran tersebut sebagai hasil kerja, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran, yaitu fungsi-fungsi pedoman kerja, alat pengorganisasian kerja, dan alat pengawasan kerja.

Dalam sektor publik, penganggaran merupakan taha yang cukup rumit dan penuh dengan nuansa politikk. Berbeda dengan sektor swasta atau bisnis, anggaran dianggap sebagai rahasia perusahaan yang tertutup

bagi publik, sedangkan pada sektor publik anggaran dianggap sebagai alat akuntabilitas publik di dalam mengelola dana publik dan program-program yang didanai dengan uang publik sehingga anggaran pada sektor publik justru harus diinfirmasikan untuk didiskusikan secara terbuka.

Oleh karena itu, anggaran sebagai instrumen mekanisme birokrasi, maka anggaran tersebut merupakan alat akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Selain itu, karena sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya untuk setiap program maupun aktivitas maka penganggaran juga merupakan aktivitas yang penting.

b. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran berada dalam ruang lingkup akuntansi manajemen, yang memiliki beberapa fungsi. Adapun beberapa fungsi anggaran dibedakan menjadi dua aspek, yaitu sebagai berikut:

c. Fungsi anggaran dari aspek mikro

Peran anggaran dari aspek mikro berhubungan dengan fungsi anggarann dalam sistem perencanaan dan pengendalian manajemen organisasi. Berikut ini fungsi anggaran dari aspek mikro, yaitu:

- 1) Anggaran sebagai alat perencanaan, anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.
- 2) Anggaran sebagai alat pengendalian, digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar

(*overspending*), pengeluaran terlalu rendah (*underspending*), salah sasaran (*miss appropriation*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).

- 3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 4) Anggaran sebagai alat politik, pada organisasi sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana untuk kepentingan tertentu. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu.
- 5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilaksanakan oleh bagian/unit kerja lainnya.
- 6) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja, anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.
- 7) Anggaran sebagai alat motivasi, anggaran dapat digunakan sebagai alat memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan.

- 8) Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik, keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun rencana kerja pemerintah (daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan rayat di lembaga legislatif.

d. Fungsi anggaran dari aspek makro

Anggaran sektor publik dapat berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah yaitu melakukan alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Anggaran sektor publik dari sudut pandang makro berfungsi sebagai:

- 1) Anggaran sebagai alat alokasi, anggaran sektor publik berfungsi sebagai suatu alat alokasi yaitu untuk mengalokasikan anggaran kedalam urusan, fungsi, organisasi, dan program kerja.
- 2) Anggaran sebagai alat distribusi, anggaran berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan atau sumber daya publik agar terjadi pemerataan keadilan ekonomi, melalui anggaran sektor publik ketimpangan ekonomi antar daerah dan antar masyarakat miskin dengan yang kaya dapat dikurangi.
- 3) Anggaran sebagai alat stabilisasi, anggaran sektor publik berfungsi sebagai alat stabilisasi yaitu untuk menciptakan stabilisasi ekonomi, sosial, dan politik.

e. Tujuan Anggaran Sektor Publik

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan

tujuan pemerintah untuk melayani dan menyejahteraan rakyat. Beberapa karakteristik tujuan pokok dari adanya anggaran sektor publik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan.
- 2) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
- 3) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai tujuan/sasaran yang ditetapkan.
- 4) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- 5) Sekali disusun, anggaran hanya dapat dalam kondisi tertentu.

f. Pentingnya Anggaran Sektor Publik

Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah adalah uang rakyat tersebut. Anggaran merupakan *blue print* keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:

- 1) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena

adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*.

- 3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

g. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

Jenis anggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai dengan kondisi perkembangan pemerintahan sebuah negara. Adapun jenis-jenis anggaran sektor publik secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Anggaran Operasioanl (Operation Recurrent Budget)

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan.

- 2) Anggaran Modal (Capital/Investment Budget)

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pada dasarnya pemerintah tidak memiliki uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik.

- 3) Anggaran Pengesahan (Tentative Anaced Budget)

Anggaran ini dibagi kedalam anggaran tentattif (tentative) dan anggaran enaced. Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislaltif karena kemunculannya dipicu oleh hal-hal tidak direncanakan sebelumnya.

Sebaliknya, anggaran enaced adalah anggaran yang direncanakan, kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.

4) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi, kabupaten, kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.

5) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

h. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Proses penyusunan anggaran sektor publik mengkomunikasikan tujuan organisasi kepada para pengelola organisasi, pengalokasian sumber daya, penyediaan umpan balik, dan motivasi pegawai. Proses penganggaran harus distandarkan dengan menggunakan anggaran manual, format anggaran, dan prosedur formal. Proses penyusunan anggaran juga harus menyesuaikan pada kebutuhan, konsistensi dengan struktur organisasi, dan mempertimbangkan sumber daya manusia. Proses penganggaran menetapkan tujuan dan kebijakan, merumuskan pembatas, menyebutkan satu persatu sumber daya yang dibutuhkan, menguji kebutuhan spesifik, menyediakan fleksibilitas, memasukkan asumsi, dan mempertimbangkan batasan. Proses penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik, yaitu:

1) Persiapan Anggaran (*Preparation*)

Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. Kemudian, setiap unit diarahkan mengajukan anggaran yang selanjutnya akan dikonsolidasi oleh bagian anggaran. Setelah ditelaah dan diadakan dengar pendapat ke semua unit, anggaran ini akan disetujui oleh kepala pemerintahan.

2) Persetujuan Lembaga Legislatif (*Legislative Enactment*)

Setelah persiapan anggaran selesai disusun oleh eksekutif, tahap selanjutnya adalah pembahasan dan pengesahan oleh anggota dewan legislatif sebagai pelaksana hak anggaran. Pembahasan di dewan meliputi pembahasan di tingkat komisi atau badan anggaran dan pembahasan di tingkat sidang paripurna dewan. Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan pembahasan untuk memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu, akan diadakan juga dengar pendapat (*public hearing*) sebelum nantinya lembaga legislatif menyetujui atau menolaknya.

3) Administrasi (*Administration*)

Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai, baik pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Bersamaan dengan tahap pelaksanaan ini, dilakukan juga proses administrasi anggaran berupa pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi.

4) Pelaporan (*Reporting*)

Realisasi atas pelaksanaan anggaran dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Pelaporan dilakukan pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan.

5) Pemeriksaan (*Post-Audit*)

Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran diperiksa (diaudit) oleh sebuah lembaga pemerintah independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi suatu masukan atau umpan balik (*feedback*) untuk proses penyusunan anggaran pada periode berikutnya.

2.1.4 Pengukuran Kinerja Sektor Publik

a. Pengertian Kinerja Sektor Publik

Kinerja merupakan hasil pencapaian atas apa yang telah dilakukan. Dalam konteks individu, kinerja dapat berupa hasil yang telah dicapai atas apa yang telah dilakukan. Sedangkan dalam konteks organisasi, kinerja dapat berupa hasil pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Namun pada dasarnya kinerja tetaplhal hal yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran. Jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka kinerjanya tidak baik. Jika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka kinerjanya baik. Dan jika

hasil yang dicapai melebihi tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka kinerjanya sangat baik.

Kinerja sektor publik adalah keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang telah ditetapkan dengan mengidentifikasikan keluaran dan hasil dari setiap kegiatan atau program secara jelas.

Pengukuran kinerja pada sektor publik dapat berguna untuk menilai prestasi pegawai dan unit organisasi. Pengukuran kinerja sangatlah penting dalam sebagai cara untuk menilai pertanggungjawaban organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Sistem *reward* dan *punishment* digunakan sebagai cara untuk mempekuat sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan sistem yang dibuat dengan tujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial maupun non finansial. Dengan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik, pengambilan keputusan dapat lebih dikembangkan dan dipertanggungjawabkan oleh organisasi.

b. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Untuk mencapai kinerja yang baik dibutuhkan tujuan yang jelas. Apabila pengukuran kinerja dilakukan secara terus menerus maka akan selalu ada perbaikan dan perkembangan kinerja. Terdapat beberapa tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada sektor publik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk menginformasikan strategi dengan lebih baik.
- 2) Untuk menciptakan akuntabilitas publik.
- 3) Untuk mencapai kepuasan yang bersumber pada pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.
- 4) Untuk mengukur kinerja secara finansial maupun non finansial.

Selain itu terdapat manfaat dilakukannya pengukuran kinerja pada sektor publik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tentang ukuran yang dipergunakan dalam menilai kinerja.
- 2) Mengevaluasi pencapaian kinerja.
- 3) Mempermudah dalam melihat tingkat kepuasan masyarakat atau pelanggan.
- 4) Memastikan bahwa keputusan yang telah diambil telah dilakukan secara objektif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara ini sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, dengan waktu dan tempat yang berbeda yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Ardila, 2015)	Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Hasil penelitian menunjukkan untuk tingkat ekonomis selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 102,27%, tetapi peningkatan yang terjadi membuat rasio tidak memenuhi standar ekonomis value for money. Tingkat efisiensi selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 107.69%, rasio beradadiatas 100% sehingga untuk rasio efisiensi tidak memnuhi standar efisien value for money. Rasio efektivitas selama 4 tahun terakhir sudah memenuhi standar sehingga menunjukkan bahwa Pengadilan negeri Tebing Tinggi sudah efektif dalam

			memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, tetapi tetap diperlukan adanya peningkatan pelayanan agar efektivitas Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tercapai lebih baik lagi.
2.	(Khairunnisa, 2018)	Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value for Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)	Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan konsep Value for Money berdasarkan 3 prinsip utama unsur-unsur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas menunjukkan bahwa: rasio ekonomi memperoleh 86,54%, 82,64% dan 71,43%, yang berarti rasio ekonomi berada dibawah 100% selama 2014-2016 dan hasil rasio ini menunjukkan bahwa kriteria rasio ekonomi memperoleh kategori “ekonomis”. Rasio efisiensi selama tahun penelitian ini 94,69%, 105,17% dan 97,95%, meskipun pada tahun 2015 rasio tersebut kurang efisien karena dalam persentase diatas 100%. Namun demikian, kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe secara keseluruhan termasuk

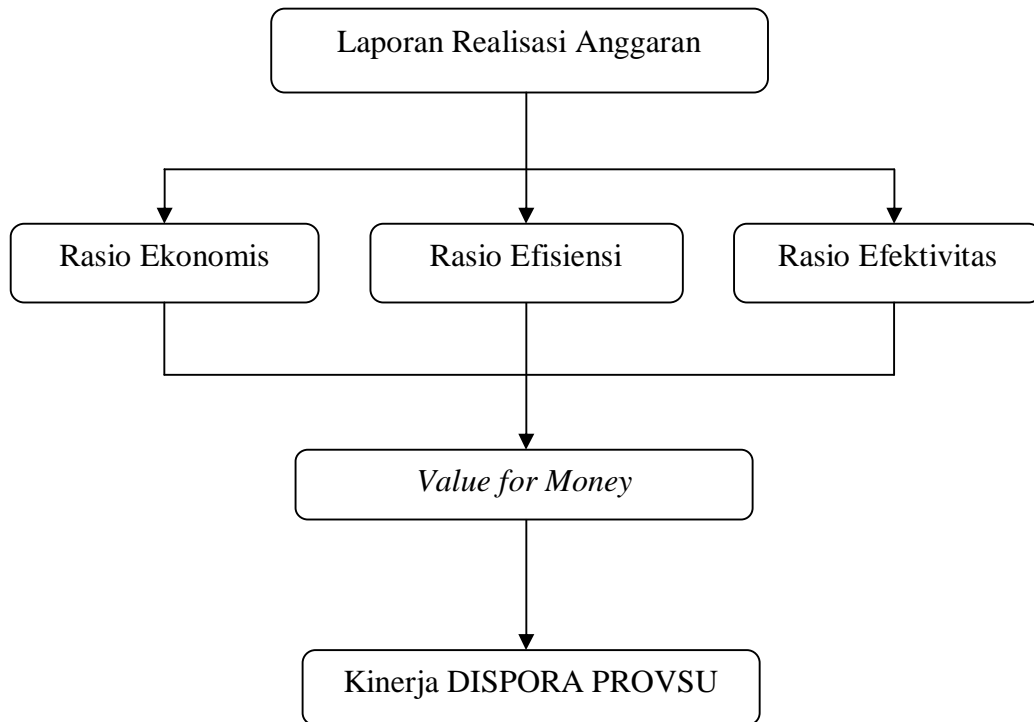
			kedalam kategori “efisien”. Sedangkan rasio efektivitas diperoleh 96,53%, 86,65% dan 76,98%, dimana persentase rasio dibawah 100% menunjukkan bahwa rasio ini mendapatkan kriteria “tidak efektif”.
3.	(Made, I. D., Purnamasari, I., Suwendra, I. W., & Cipta, 2015)	Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value for Money Audit atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007-2011 secara total berada pada kategori sangat baik, aan tetapi jika dilihat dari rata-rata rasio : (1) ekonomi berada pada kriteria sangat ekonomis, (2) efisiensi berada pada kriteria cukup efisien, dan (3) efektivitas berada pada kriteria sangat efektif.
4.	Wardiman Zain	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value for Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng	Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama taun 2012-2016 ekonomis karena memiliki rata-rata rasio ekonomi dibawah 100% yaitu 93,91%. Dari segi efisiensi kinerja

			<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 yaitu efisien karena memiliki rata-rata rasio efisiensi 96,05%. Dan dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2012-2016 yaitu 96,05% yang menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 tidak efektif.</p>
5.	Ratna Sari (2017)	<p>Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang selama tahun 2010-2014 tidak ekonomis karena memiliki rata-rata rasio ekonomi lebih dari 100% yaitu 104,63%. Dari segi efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang selama tahun 2010-2014 yaitu efisien karena memiliki rata-rata rasio efisiensi 95,89%. Dan dari segi efektivitas, rata-rata efektivitas tahun 2010-2014 yaitu 108,26% yang menunjukkan Kinerja Pemerintah Daerah</p>

			Kabupaten Pinrang selama tahun 2010-2014 sangat efektif.
6.	Yuyun Novita Sari (2020)	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Prinsip Value for Money (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)	Berdasarkan hasil penelitian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan metode value for money yang diukur dengan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan tidak tercapainya target atas Pendapatan Daerah, dan juga meningkatnya jumlah Belanja Daerah Kota Medan, dimana realisasi Belanja Daerah Kota Medan lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Daerah, hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan mengalami defisit atau kerugian.

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan judul yang penulis yaitu “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value for Money (Studi Kasus Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara)”. Maka kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan dengan:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Organisasi sektor publik sering dianggap sebagai tempat inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang sering merugi. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik agar menciptakan akuntabilitas publik. *Value for money* merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah.

Value for money menjelaskan hubungan antara sumber daya atau biaya dengan manfaat atau hasil yang disampaikan melalui proses mengubah sumber daya yang menghasilkan pencapaian tujuan yang baik. Oleh karena itu, penulis akan mengukur rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2015).

Penelitian ini dilakukan dengan menghitung rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas yang datanya berasal dari laporan realisasi anggaran yang berupa angka-angka. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, menafsirkan data yang telah dikumpulkan, dan menampilkan hasilnya dengan menggunakan angka. Lalu hasil tersebut akan dideskripsikan untuk menjawab rumusan masalah sebelumnya.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 59). Setiap variabel harus didefinisikan secara jelas, sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran.

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip *Value for Money* (Studi Kasus pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara)”. Maka definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Value for money* merupakan suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program yang mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
2. Rasio ekonomis

Rasio ekonomis adalah rasio pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomis suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam menggunakan sumber daya. Ekonomis adalah perolehan sumber daya tertentu pada harga yang terendah. Hal ini berhubungan dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir penggunaan sumber daya yaitu dengan menghindari pengeluaran yang tidak efektif dan boros. Adapun rumus rasio ekonomis adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria ekonomis dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

Tabel 3.1. Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90% - 100%	Ekonomis
80% - 90%	Cukup Ekonomis
60% - 80%	Kurang Ekonomis
Kurang Dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber : (Cipta, 2014)

1. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam menggunakan sumber daya. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara sesuatu yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien jika suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang serendah-rendahnya. Adapun rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Berikut ini kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu:

Tabel 3.2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang Dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : (Cipta, 2014)

2. Rasio efektivitas

Rasio efektivitas adalah rasio pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam menggunakan sumber daya. Efektivitas pada dasarnya

berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara hasil dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Rumus rasio efektivitas yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Rasio Efektivitas	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang Dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : (Cipta, 2014)

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Williem Iskandar Nomor 9 Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai dengan Mei 2021.

Tabel 3.4
Waktu Penelitian

No	Keterangan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1.	Pengajuan judul																										
2.	Pra riset																										
3.	Penyusunan proposal																										
4.	Bimbingan proposal																										
5.	Seminar proposal																										
6.	Penyempurnaan proposal																										
7.	Riset																										
8.	Penyusunan skripsi																										
9.	Bimbingan skripsi																										
10.	Sidang meja hijau																										

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, dimana data penelitian ini berupa data yang diambil dan dihitung merupakan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2018 sampai dengan 2020 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh berupa dokumentasi yaitu jumlah hasil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Jenis sumber data penelitian ini adalah data sekunder, dimana data didapatkan langsung dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (DISPORA PROVSU). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran DISPORA PROVSU pada tahun 2018-2020.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai masalah yang diteliti. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan rumus yang ada dalam prinsip *value for money*, yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Setelah itu akan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Data yang dikumpulkan berupa laporan realisasi anggaran DISPORA PROVSU pada tahun 2018-2020.

2. Melakukan analisis terhadap data

Pada tahap ini penulis akan membuat perhitungan *value for money* yaitu rasio ekonomis, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi dengan menggunakan rumus yang ada. Setelah itu, hasil setiap perhitungan akan ditampilkan dalam bentuk tabel.

3. Mendeskripsikan hasil perhitungan

Tahap ini menjelaskan hasil perhitungan yang telah dilakukan pada setiap rasio yang ada dengan melihat berdasarkan kriteria masing-masing rasio.

4. Menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan

Tahapan terakhir yaitu membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (DISPORA PROVSU) merupakan salah satu instansi pemerintah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Tugas dari DISPORA PROVSU yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi di bidang kebudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, layanan kepemudaan sarana dan prasarana olahraga serta tugas pembantuan. Selain itu DISPORA PROVSU memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
2. Pelaksanaan kebijakan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pelaksanaan evaluasi kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas perbantuan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
5. Pelaksanaan pengkoordinasian unit pelaksanaan teknis sekolah kebakatan olahraga dan kawasan pusat olahraga.
6. Pelaksanaan administrasi kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait dengan uraian tugas dan fungsinya.

Sebagai penanggungjawab di bidang kepemudaan dan merealisasikan tujuan pembangunan Daerah Sumatera Utara, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara merumuskan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Pemuda dan Masyarakat Olahraga Sumatera Utara yang Berwawasan Kebangsaan, Terampil, Mandiri, Sehat, Berprestasi dan Berdaya Saing yang Dilandasi Iman dan Takwa”.

Dan untuk mewujudkan cita-cita Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (DISPORA PROVSU) yang tertuang dalam visi DISPORA PROVSU, diperlukan suatu perencanaan program atau kegiatan organisasi yang harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, DISPORA PROVSU menyusun misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi dan kreativitas pemuda dalam menciptakan masyarakat Sumatera Utara yang terampil dan berdaya saing.
2. Mempersiapkan kader pemimpin bangsa yang beriman, memiliki wawasan kebangsaan serta peduli terhadap lingkungan.
3. Membentuk pemuda yang memiliki jiwa kewirausahaan dan kemandirian.
4. Meningkatkan peran, fungsi dan partisipasi pemuda dalam mewujudkan iklim yang kondusif.
5. Mewujudkan sistem manajemen keolahragaan dalam upaya menata sistem pembinaan pembangunan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan.

6. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat, serta peningkatan prestasi.
7. Memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan upaya mendukung peningkatan mutu pembinaan dan pembangunan olahraga.
8. Meningkatkan dan memberdayakan organisasi keolahragaan dalam rangka meningkatkan efektivitas jaringan kerja bidang keolahragaan.
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan, memasyarakatkan dan membudayakan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehingga masyarakat sehat bugar akan terwujud.
10. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam upaya mengembangkan industri olahraga guna mendukung pengembangan sarana dan prasarana olahraga.

Dengan adanya visi, misi dan tujuan DISPORA PROVSU menunjukkan bahwa DISPORA PROVSU menjadi organisasi dengan sistem anggaran kinerja. Menurut (Mardiasmo, 2013), sistem anggaran kinerja merupakan sistem anggaran yang mencakup tujuan dan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Tahap perencanaan dalam mempersiapkan anggaran sangat penting dilakukan. Karena penganggaran adalah aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja yang cenderung tidak terbatas. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan

dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.

Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *Value for Money* atau pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan dan cenderung boros (*over spending*). Menurut pendekatan anggaran berbasis kinerja, pemerintah akan diawasi dan dikendalikan melalui penerapan *interval cost awareness*, audit keuangan, audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Oleh sebab itu, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan *cost minded* dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Value for Money merupakan inti dalam pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai melalui output saja, melainkan harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Pengembangan indikator kinerja berpusat pada ekonomis, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan yang sering disebut 3E. (1) Ekonomis yang artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, (2) Efisien yang artinya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. (3) Efektivitas yang artinya berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran.

4.2 Analisis Data

1. Rasio Ekonomis

Pengukuran tingkat ekonomis yaitu tingkat biaya yang dikeluarkan suatu organisasi untuk melakukan suatu pelayanan kepada publik. Tingkat ekonomis dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah sehingga mendapat persentase tingkat pencapaiannya.

Dalam mengukur tingkat ekonomis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp. 104.716.485.881,00}}{\text{Rp. 113.338.446.413,00}} \times 100\% \\ &= 92,39\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp. 127.393.224.181,15}}{\text{Rp. 149.929.817.472,00}} \times 100\% \\ &= 84,97\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp. 275.832.628.993,52}}{\text{Rp. 308.182.643.183,80}} \times 100\% \\ &= 89,50\% \end{aligned}$$

Tabel 4.1
Rasio Ekonomis
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Ekonomis
2018	Rp. 113.338.446.413,00	Rp. 104.716.485.881,00	92,39%
2019	Rp. 149.929.817.472,00	Rp. 127.393.224.181,15	84,97%
2020	Rp. 308.182.643.183,80	Rp. 275.832.628.993,52	89,50%

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.1, maka untuk rasio ekonomis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (DISPORA PROVSU) yang diukur dalam 3 tahun, maka pada tahun 2018 rasio ekonomis sebesar 92,39% sehingga termasuk dalam kategori ekonomis karena berada antara 90% sampai 100%. Sedangkan tahun 2019 rasio ekonomis sebesar 84,97% sehingga termasuk dalam kategori cukup ekonomis karena berada antara 80% sampai 90%, hal ini berarti tingkat ekonomis mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dan tahun 2020 rasio ekonomis sebesar 89.50% sehingga termasuk dalam kategori cukup ekonomis karena berada antara 80% sampai 90%, hal ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan rasio ekonomis dari tahun sebelumnya namun masih dalam kategori yang sama.

Anggaran belanja setiap tahunnya mengalami peningkatan begitu juga realisasi belanja yang ikut mengalami kenaikan, hal ini dibuktikan dengan perhitungan rasio ekonomis bahwa tingkat ekonomis DISPORA PROVSU mengalami penurunan.

Akan tetapi, walaupun DISPORA PROVSU mengalami penurunan tingkat ekonomis DISPORA PROVSU telah mampu melakukan penghematan belanja setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran bahwa setiap tahunnya DISPORA PROVSU anggaran belanja yang telah ditetapkan tidak habis terpakai saat realisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa DISPORA PROVSU telah memenuhi syarat ekonomis.

Rasio ekonomis DISPORA PROVSU untuk tahun 2018 sampai tahun 2020 terus mengalami fluktuatif. Dengan dilakukannya analisis rasio ekonomis dapat diketahui seberapa besar tingkat ekonomis dengan

membandingkan realisasi belanja DISPORA PROVSU terhadap anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Suatu kegiatan tergolong efisien jika suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya seminimum mungkin. Akan tetapi dengan adanya sisa anggaran belanja yang telah ditetapkan dapat menunjukkan bahwa suatu organisasi masih belum merealisasikan semua program yang telah direncanakan.

Dalam mengukur tingkat efisiensi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp. 104.716.485.881,00}}{\text{Rp. 1.225.557.250,00}} \times 100\% \\ &= 8.544,40\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp. 127.393.224.181,15}}{\text{Rp. 1.647.605.250,00}} \times 100\% \\ &= 7.732,02\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp. 275.832.628.993,52}}{\text{Rp. 382.160.250,00}} \times 100\% \\ &= 72.177,22\% \end{aligned}$$

Tabel 4.2
Rasio Efisiensi
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi
-------	----------------------	-------------------	-----------------

2018	Rp. 1.225.557.250,00	Rp. 104.716.485.881,00	8.544,40%
2019	Rp. 1.647.605.250,00	Rp. 127.393.224.181,15	7.732,02%
2020	Rp. 382.160.250,00	Rp. 275.832.628.993,52	72.177,22%

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan data pada tabel 4.2, dapat dilihat rasio efisiensi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara mulai tahun 2018 sampai dengan 2020 berada dikategori tidak efisien karena hasil perhitungan menunjukkan angka diatas 100%.

Hal ini berarti DISPORA PROVSU dinilai tidak efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan. Walaupun DISPORA PROVSU mampu menghasilkan pendapatan melebihi anggaran yang ditetapkan dan mampu melakukan penghematan belanja. Keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja tersebut lebih besar daripada realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

3. Rasio Efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas dinilai efektif apabila suatu organisasi, program, atau kegiatan yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Dalam mengukur tingkat efektivitas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp. 1.225.557.250,00}}{\text{Rp. 1.075.000.000,00}} \times 100\% \\ &= 114,01\% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp. 1.647.605.250,00}}{\text{Rp. 1.260.000.000,00}} \times 100\%$$

$$= 130,76\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp. 382.160.250,00}}{\text{Rp. 793.800.000,00}} \times 100\%$$

$$= 48,14\%$$

Tabel 4.3
Rasio Efektivitas
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efektivitas
2018	Rp. 1.075.000.000,00	Rp. 1.225.557.250,00	114,01%
2019	Rp. 1.260.000.000,00	Rp. 1.647.605.250,00	130,76%
2020	Rp. 793.800.000,00	Rp. 382.160.250,00	48,14%

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat rasio efektivitas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 rasio efektivitas sebesar 114,01% yang berarti dalam kategori sangat efektif karena berada diatas 100%. Sedangkan pada tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 130,76% yang berarti dalam kategori sangat efektif karena berada diatas 100%. Dan pada tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 48,14% sehingga termasuk dalam kategori tidak efektif.

Pada tahun 2018 dan 2019 anggaran pendapatan mengalami kenaikan yang diiringi dengan realisasi pendapatan yang juga mengalami kenaikan. Akan tetapi, pada tahun 2020 anggaran pendapatan menurun karena adanya Pandemi Covid-19 yang juga mengakibatkan menurunnya realisasi pendapatan DISPORA PROVSU.

Secara garis besar, DISPORA PROVSU mampu merealisasikan pendapatan melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat

melalui perbandingan realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan pada tahun 2018 dan 2019. Namun dengan adanya Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi tingkat pendapatan DISPORA PROVSU yang menyebabkan tidak tercapainya anggaran atau target yang telah ditetapkan.

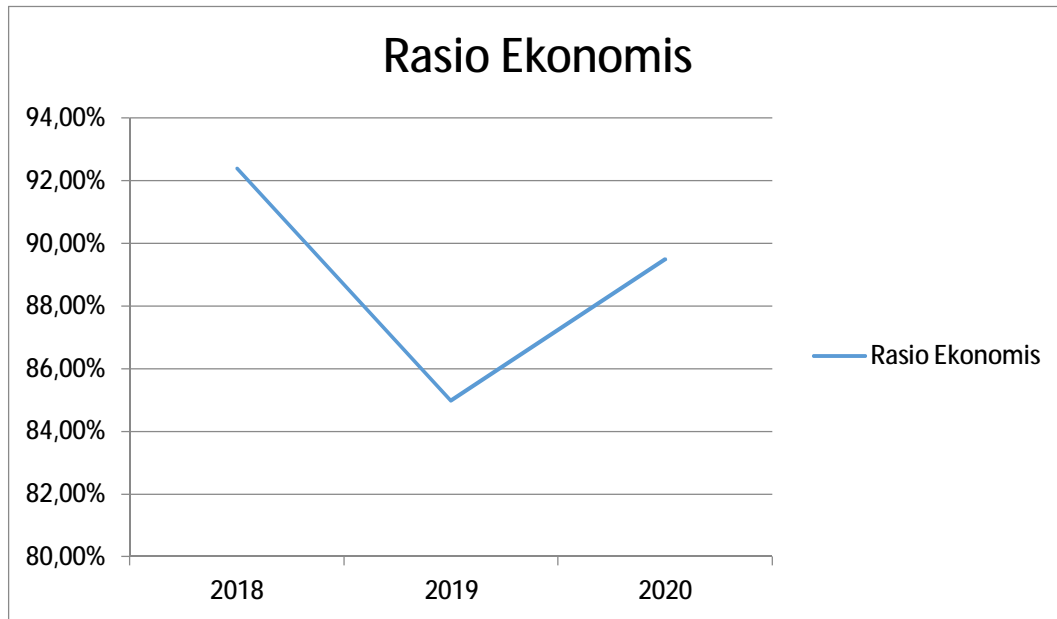
Tingkat rasio efektivitas DISPORA PROVSU untuk tahun 2018 sampai dengan 2020 juga mengalami fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya rasio efektivitas dari tahun 2018 ke tahun 2019. Dan juga menurunnya rasio efektivitas dari tahun 2019 ke tahun 2020.

4.3 Pembahasan

Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (DISPORA PROVSU) yang dikukur dengan prinsip *value for money* mengalami penurunan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomis

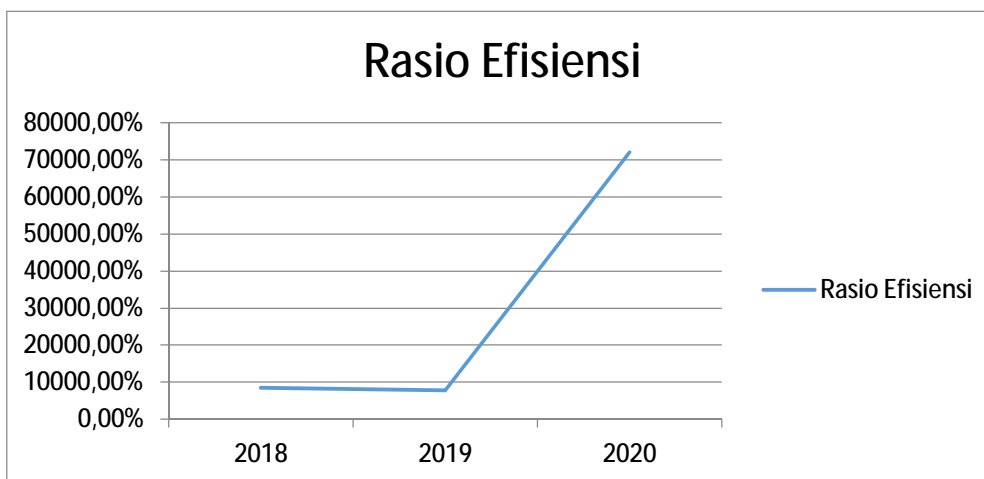
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka perubahan tingkat rasio ekonomis DISPORA PROVSU dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



Dapat dilihat dari grafik diatas bahwa rasio ekonomis DISPORA PROVSU pada tahun 2018 adalah sebesar 92,39% sehingga termasuk dalam kategori ekonomis karena berada diantara 90% sampai dengan 100%. Pada tahun 2019 rasio ekonomis sebesar 84,97% sehingga termasuk dalam kategori cukup ekonomis karena berada antara 80% sampai dengan 90%, hal ini berarti rasio ekonomis di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 7,42% dari tahun 2018. Dan pada tahun 2020 rasio ekonomis sebesar 89,50% sehingga termasuk dalam kategori cukup ekonomis karena berada diantara 80% sampai dengan 90%, artinya rasio ekonomis tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,53% namun walaupun terjadi peningkatan masih berada dalam kategori cukup ekonomis. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa rasio ekonomis DISPORA PROVSU pada tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi.

2. Rasio Efisiensi

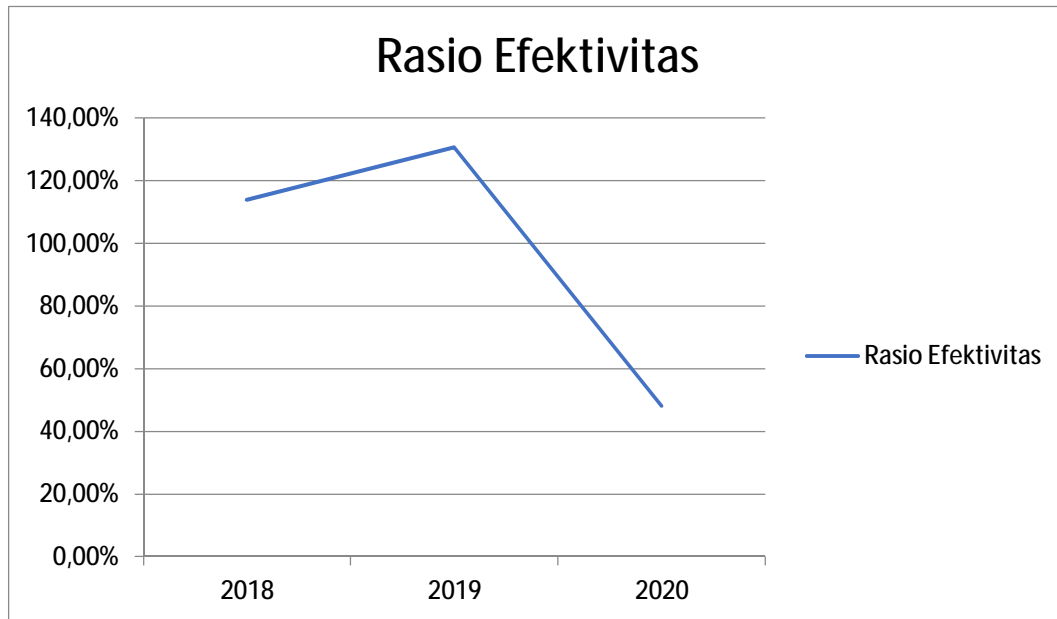
Analisis data menunjukkan adanya perubahan tingkat rasio efisiensi DISPORA PROVSU dari tahun 2018 sampai 2020 yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Untuk rasio efisiensi DISPORA PROVSU tahun 2018 sebesar 8.544,40% sehingga berada dalam kategori tidak efisien karena rasio lebih dari 100%. Sedangkan pada tahun 2019 rasio efisiensi sebesar 7.732,02% sehingga berada dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%, hal ini berarti rasio efisiensi pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 namun masih belum merubah kategori menjadi lebih baik. Dan tahun 2020 rasio ekonomis sebesar 71.177,22% sehingga berada dalam kategori tidak efisien karena berada diatas 100%, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi mengalami penurunan yang sangat signifikan.

3. Rasio Efektivitas

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya telah terjadi perubahan tingkat rasio efektivitas DISPORA PROVSU yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Rasio efektivitas DISPORA PROVSU tahun 2018 adalah 114,01% sehingga termasuk dalam kategori sangat efektif karena berada diatas 100%. Sedangkan pada tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 130,76% sehingga berada dalam kategori sangat efektif karena diatas 100%, selain itu rasio efektivitas pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 16,75%. Dan pada tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 48,14% sehingga termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 60%, hal ini menunjukkan terjadinya penurunan tingkat efektivitas pada tahun 2020 sebesar 82,62%.

4. Terjadinya penurunan kinerja DISPORA PROVSU disebabkan karena menurunnya pendapatan yang diterima sedangkan belanja yang dikeluarkan mengalami kenaikan. Sehingga defisit DISPORA PROVSU setiap tahunnya terus bertambah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2020 rasio ekenomis dan rasio efektivitas DISPORA PROVSU

mengalami fluktuasi yang masih tergolong normal, di sisi lain rasio efisiensi mengalami fluktuasi akan tetapi jauh dari kategori efisien. Namun hal ini merupakan pengaruh adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya sumber pendapatan yang biasanya diterima oleh DISPORA PROVSU. Contohnya dengan ditutupnya gelanggang olahraga dan kolam renang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja DISPORA PROVSU mengalami penurunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis kinerja keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan prinsip value for money dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Ditinjau dari rasio ekonomis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sampai dengan 2020 sudah ekonomis karena realisasi belanja masih dibawah anggaran belanja, namun terjadi penurunan atas kinerjanya.
2. Ditinjau dari rasio efisiensi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak efisien karena setiap tahunnya realisasi belanja lebih besar daripada realisasi pendapatan yang berarti mengalami kerugian atau defisit secara terus menerus.
3. Ditinjau dari rasio efektivitas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sampai dengan 2020 sudah efektif karena mampu mencapai bahkan melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini terdapat beberapa saran dari peneliti, yaitu:

1. Bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara

Diharapkan untuk mengurangi belanja semaksimal mungkin dan meningkatkan pendapatan. Sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau defisit.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk melakukan penelitian di organisasi sektor publik lainnya terutama organisasi yang ada Sumatera Utara untuk mengetahui kinerja keuangannya. Sehingga organisasi sektor publik yang ada di Sumatera Utara menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, I. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 78–85.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Cipta, W. (2014). Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value for Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011. *E-Journal Bismal*, 2(1), 35–42.
- Erawan, P. A., Santosa, M. S. W. A., Budiarta, D. K. B., & Wahyudi, P. T. A. (2019). Peranan Value for Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(3), 187–193.
- Glynn. (2013). *American Accounting Association*. Tiga Serangkai.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2013. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, Arfan, dkk. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Medan: Madenatera.
- Indra, B. (2016). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Khairunnisa, I. &. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value for Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1–10.
- Made, I. D., Purnamasari, I., Suwendra, I. W., & Cipta, W. (2015). Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value for Money Audit atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011. *Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 2. *Kurna AKuntansi Keuangan*, 3(2), 114–124.
- Mardiasmo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Renyowijoyo, Muindro. (2013). *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba (Edisi 3)*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sari, Ratna. (2017). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang). *Skripsi*.


- Sari, Y. N. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Prinsip Value for Money (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan). *Skripsi*, 1–9.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Ulimpa, Y. S., Sondakh, J. J., & Runtu, T. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Daerah Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 302–307.
- Ulum, I. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Graha Ilmu.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2018 DAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 13	Keperemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 2 . 13 . 01	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01	Dinas Pemuda dan Olah Raga

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
1	PENDAPATAN	1.075.000.000,00	1.225.557.250,00	114,01	1.181.000.500,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.075.000.000,00	1.225.557.250,00	114,01	1.181.000.500,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.075.000.000,00	1.225.557.250,00	114,01	1.181.000.500,00
2	BELANJA	113.338.446.413,00	104.716.485.881,00	92,39	139.823.607.020,00
2.1	BELANJA OPERASI	69.989.873.257,00	63.630.033.259,00	90,91	61.564.382.744,00
2.1.1	Belanja Pegawai	14.768.065.966,00	16.759.143.786,00	113,48	13.589.821.885,00
2.1.2	Belanja Barang	55.221.807.291,00	46.870.889.473,00	84,88	47.974.560.859,00
2.2	BELANJA MODAL	43.348.573.156,00	41.086.452.622,00	94,78	78.259.224.276,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.898.570.796,00	3.831.543.958,00	98,28	10.084.511.950,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	34.356.330.210,00	32.420.013.464,00	94,36	64.183.643.226,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.061.747.500,00	3.904.627.000,00	96,13	0,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.031.924.650,00	930.268.200,00	90,15	3.991.069.100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(112.263.446.413,00)	(103.490.928.631,00)	92,19	(138.642.606.520,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(112.263.446.413,00)	(103.490.928.631,00)	92,19	(138.642.606.520,00)

Medan, 31 Desember 2018 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu
 H. Baharuudin Sopian, SH, M.Si NIP. 196606161988101001

Halaman 1 dari 1



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 13 Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Pemuda dan Olah Raga

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
1	PENDAPATAN	1.260.000.000,00	1.647.605.250,00	130,76	1.225.557.250,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.260.000.000,00	1.647.605.250,00	130,76	1.225.557.250,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.260.000.000,00	1.647.605.250,00	130,76	1.225.557.250,00
2	BELANJA	149.929.817.472,00	127.393.224.181,15	84,97	104.716.485.881,00
2.1	BELANJA OPERASI	92.858.225.110,00	76.330.009.094,15	82,20	63.630.033.259,00
2.1.1	Belanja Pegawai	21.855.720.598,00	20.291.616.380,00	92,84	16.759.143.786,00
2.1.2	Belanja Barang	71.002.504.512,00	56.038.392.714,15	78,92	46.870.889.473,00
2.2	BELANJA MODAL	57.071.592.362,00	51.063.215.087,00	89,47	41.086.452.622,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	6.414.525.036,00	5.785.999.176,00	90,20	3.831.543.958,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	39.212.277.730,00	37.731.820.652,00	96,22	32.420.013.464,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	125.000.000,00	124.700.000,00	99,76	3.904.627.000,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	11.319.789.596,00	7.420.695.259,00	65,56	930.268.200,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(148.669.817.472,00)	(125.745.618.931,15)	84,58	(103.490.928.631,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(148.669.817.472,00)	(125.745.618.931,15)	84,58	(103.490.928.631,00)

Medan, 31 Desember 2019

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLARAGA

H. BAHARUDDIN STAGIAN, SH, M.Si

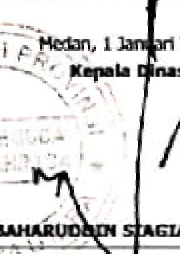
NIP. 196606101988101001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2.13	Keperudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi : 2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 2.13.01.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA	793.800.000,00	382.160.250,00	48,14	1.647.605.250,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	793.800.000,00	382.160.250,00	48,14	1.647.605.250,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	793.800.000,00	382.160.250,00	48,14	1.647.605.250,00
5	BELANJA	308.182.643.183,80	275.832.628.993,52	89,50	127.393.224.181,15
5.1	BELANJA OPERASI	77.198.538.680,80	57.742.845.365,20	74,80	76.330.009.094,15
5.1.1	Belanja Pegawai	16.035.340.000,00	15.272.741.061,00	95,24	16.928.984.380,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	61.163.198.680,80	42.470.104.304,20	69,44	59.401.024.714,15
5.2	BELANJA MODAL	230.984.104.503,00	218.089.783.628,32	94,42	51.063.215.087,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	189.338.957.847,00	179.500.365.724,00	94,80	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.862.489.622,00	4.305.443.360,00	88,54	5.785.999.176,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.525.593.039,00	24.151.059.544,32	91,05	37.731.820.652,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.208.700.000,00	1.168.541.000,00	96,68	124.700.000,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.048.363.995,00	8.964.374.000,00	99,07	7.420.695.259,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(307.388.843.183,80)	(275.450.468.743,52)	89,61	(125.745.618.931,15)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(307.388.843.183,80)	(275.450.468.743,52)	89,61	(125.745.618.931,15)

Medan, 1 Januari 2020
 Kepala Dinas

H. BAHARUDDIN STAGIAN, SH, M.Si
 NIP. 19660610 198810 1 001



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
.....20...M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : A D E K H A I R U N N I S A

NPM : 1 7 0 5 1 7 0 3 0 4

Tempat, Tgl. Lahir : I N D R A P U R A
2 1 M A R E T 1 9 9 9

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L. H M S A R I M A N G G K O M
P L E K L A U T D E N D A N G

Tempat Penelitian : D I N A S P E M U D A D A N
O L A H R A G A P R O V I N S I
S U M A T E R A U T A R A

Alamat Penelitian : J A L A N W I L L I E M
I S K A N D A R N O . 9 M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(..Fikriani Saragih, S.E., M.Si...)

Wassalam
Pemohon

(.....Ade Khairunnisa.....)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1978/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/1/2021

Nama Mahasiswa : ADE KHAIRUNNISA
NPM : 1705170304
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Tanggal Pengajuan Judul : 29/1/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Lufriansyah, SE, M.Ak. (6 Februari 2021)

Judul Disetujui**)

.....
Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah
dengan Menggunakan Prinsip Value for Money
(Studi Kasus pada Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Utara)
.....

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

(Lufriansyah, S.E., M.Ak.)

Keterangan:

*) Ditai oleh Pimpinan Program Studi

**) Ditai oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 743/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 23 Maret 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ade Khairunnisa
N P M : 1705170304
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value for Money (Studi Kasus pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara)

Dosen Pembimbing : Lufriansyah, SE., M.Ak

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **25 Maret 2022**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1442 H
25 Maret 2021 M



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Peringgal.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ade Khairunnisa
NPM : 1705170304
Dosen Pembimbing : Lufriansyah, SE, M.Ak
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip *Value for Money* (Studi Kasus Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perjelas fenomena masalah - manfaatkan data yang berhubungan - Identifikasi masalah - tison penelitian		
Bab 2	- Perbaiki uraian teori - tahun pengutipan 10 tahun terakhir - kerangka berfikir diperbaiki		
Bab 3	- Pendekatan penelitian - Teknik pengumpulan data - teknik analisis data		
Daftar Pustaka	- Perbaiki cara pengutipan		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- metode pengumpulan data menggunakan skala Likert		
Persetujuan Seminar Proposal	ACC Proposal		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, 7 April 2021

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Lufriansyah, SE, M.Ak)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 23 April 2021* mencrangkan bahwa:

Nama : Ade Khairunnisa
NPM : 1705170304
Tempat / Tgl.Lahir : Indrapura, 21 Maret 1999
Alamat Rumah : Jl. H. M. Sariman Gg. Komplek No. 1 Laut Dendang
Judul Proposal : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing: Lufriansyah, S.E., M.Ak

Medan, 23 April 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Lufriansyah, SE., M.Ak

Pembanding

Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 23 April 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Ade Khairunnisa*
NPM. : 1705170304
Tempat / Tgl.Lahir : Indrapura, 21 Maret 1999
Alamat Rumah : Jl. H. M. Sariman Gg. Komplek No. 1 Laut Dendang
Judul Proposal : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara)

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>
<i>Bab I</i>	- Memperjelas Latar belakang - Menambahkan identifikasi masalah - Menghilangkan batasan masalah
<i>Bab II</i>	Menambahkan tabel penelitian terdahulu
<i>Bab III</i>	Perbaiki sesuai pedoman
<i>Lainnya</i>
<i>Kesimpulan</i>	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 23 April 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Lufriansyah, SE., M.Ak

Pembanding

Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjabar surat ini agar di sebitkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 740/IL3-AU/UMSU-05/F/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Riset

Medan, 11 Sya'ban 1442 H
25 Maret 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara
Jln. Williem Iskandar No.9 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ade Khairunnisa
Npm : 1705170304
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value for Money (Studi Kasus pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Peringgal



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Willem Iskandar No. 9 Medan - 20222

Telp. : (061) 6645502 Fax. : (061) 6645501

website : <http://dispورا.sumutprov.go.id>, email : dispورا@sumutprov.go.id

Medan, 29 Maret 2021

Nomor : 071 / 1023 /Disporasu/2021
Sifat : -
Lamp : -
Perihal : **Izin Riset**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara
di -
Medan

Dengan hormat, Sesuai dengan surat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 740/II.3-AU/UMSU-05/F/2021 tanggal 25 Maret 2021 perihal Izin Riset.

Sehubungan hal di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui Mahasiswa Saudari untuk melaksanakan Riset pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Adapun nama yang Saudara usulkan adalah sebagai berikut :

Nama : **Ade Khairunnisa**
NPM : 1705170304
Jurusan : Akuntansi
Judul : *"Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value for Money (Studi Kasus pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara)"*.

Bagi mahasiswi yang melaksanakan Penelitian di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKRETARIS



RUDI RINALDI, S.Sos, MAP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19631206 198703 1 003



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengakhiri surat ini agar di sebitikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 1604/IL3-AU/UMSU-05/F/2021
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 26 Dzulqad'ah 1442 H
07 Juli 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara
Jln. Williem Iskandar No. 9 Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ade Khairunnisa
N P M : 1705170304
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value for Money (Studi Kasus pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



C.c. File



H. Januri, SE., MM., M.Si



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Willem Iskandar No. 9 Medan - 20222

Telp. /Fax. : (061) 6645501

website : <http://dispورا.sumutprov.go.id>, email : dispورا@sumutprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423/1784 /Disporasu/2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RUDI RINALDI, S.Sos, MAP
NIP : 19631206 198703 1 003
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat II / IV.b
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Ade Khairunnisa
NIM : 1705170304
Perguruan Tinggi : Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

Benar telah melaksanakan Riset pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dengan Judul "*Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value for Money (Studi Kasus pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara).*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 18 Juni 2021

a.n. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Plt. SEKRETARIS

RUDI RINALDI, S.Sos, MAP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19631206 198703 1 003

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan : ...7...Juli... 2021

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Di
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ade Khairunnisa
N P M : 1705170304
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. H.M. Sariman Gg. Komplek Laut Dendang
Judul Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value for Money

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial (Asli)
2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 lembar dan foto copy Kartu Keluarga dan KTP seukuran A4 (2 lembar)
4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
5. Foto Copy Seluruh SKPI masing masing 1 lembar
6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
7. Pas photo terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
8. Skripsi yang telah disahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukkan kedalam map warna biru.

Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam

Pemohon

Ade Khairunnisa

Disetujui oleh
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dekan

Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

H. JANURI., SE., MM., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : Ade Khairunnisa
N P M : 1705170304
Tempat/Tgl. Lahir : Indrapura, 21 Maret 1999
Program Studi : Akuntansi
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jl. H.M. Sariman Gg. Komplek Laut Dendang
Pekerjaan/Instansi : _____
Alamat Kantor : _____

Melalui surat permohonan tertanggal 7 Juli 2021 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 7 Juli 2021

Saya yang Menyatakan



Ade Khairunnisa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Ade Khairunnisa
NPM : 1705170304
Tempat dan Tanggal Lahir : Indrapura, 21 Maret 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke- : 2 dari 4 bersaudara
Alamat : Jl. H. M. Sariman Gg. Komplek No. 1 Laut Dendang
No. Telepon : 085373637462
Email : adek.k2103@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Drs. Rusli
Pekerjaan : PNS (Guru)
Nama Ibu : Sulastri
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. H. M. Sariman Gg. Komplek No. 1 Laut Dendang

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 106162 Medan Estate
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 35 Medan
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMK Negeri 1 Medan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 7 September 2021



Ade Khairunnisa